

LAHIRNYA KONSEP NEGARA SEKULAR DALAM PEMIKIRAN BARAT

Drs. Armaidly Armawi M.Si.

Staf Pengajar Fakultas Filsafat UGM

Negara sebagai suatu masyarakat politik telah lahir sejak jaman Yunani. Istilah politik berasal dari kata Yunani yang berarti 'kota'. Pada jaman ini pengertian politik mengalami perkembangan sedemikian rupa, sesuai dengan keyakinan ontologik para pakar politik.

Menurut pakar ilmu politik Amerika, David Easton, politik adalah penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat (Miriam 1977: 12-13).

Istilah 'state' yang berarti negara, berasal dari kata latin 'status'. Menurut *Webster Dictionary*, negara adalah sejumlah orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir seluruhnya bebas dari pengawasan luar serta memiliki kekuasaan memaksa demi mempertahankan keteraturan dalam masyarakat (Babcock 1961: 1755).

Ziya Gokalp dalam bukunya *Turkish Nationalism and Western Civilization* mengartikan negara sebagai suatu otoritas publik yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan hukum atas individu-individu yang keselamatan-

nya berada di bawah lindungan negara (Gokalp 1959: 214). Sedangkan Mac Iver dalam bukunya *Modern state* mengartikan negara sebagai alat masyarakat (*state is an instrument of social man*) (Mac Iver 1988: 5).

Pengertian Iver bersifat sosiologik, karena ia menempatkan negara dan masyarakat dalam hubungan yang erat. Dalam pembahasannya ia sendiri sebenarnya lebih menekankan pada pemerintah. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan negara. Dalam hal ini pengertian negara sifatnya abstrak, kekongkritannya terletak pada wujud pemerintahannya. Dengan demikian pemerintah adalah alat negara, organ negara (Djoko Sutono 1982: 43).

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa terbentuknya negara mensyaratkan adanya wilayah, rakyat, pemerintah dan konstitusi.

Abad Pertengahan

Agama sebagai institusi yang timbul dan berkembang dalam sejarah pemikiran memiliki andil besar dalam perkembangan pemikiran mengenai negara. Ia mengalami dominasi dalam kehidupan politik di jaman pertengahan. Dalam abad pertengahan, kekuasaan gereja dominan sekali. Agama Kristiani menjadi pegangan hidup yang mutlak sehingga kebebasan berpikir tidak ada. Pemerintahan masa itu dikenal dengan nama theokrasi.

Abad pertengahan ditandai pula dengan kekuasaan gereja Katolik yang hampir menguasai disegala lapisan masyarakat, sehingga kebudayaan yang dilahirkan kala itu bercirikan pada kekuasaan agama...*Ancilla Teologia* (Beerling, 78). Kehendak dan kekuasaan Ilahi melingkupi segala kehidupan dan merupakan landasan keanekaragaman hidup dan bermacam watak yang sangat menarik. Allah menjamin tata kehidupan masyarakat yang di dalamnya semua orang memiliki kedudukan dan pemisahan pasti, seperti kaum ningrat, pedagang, petani, biarawan dan pria-wanita. Dalam dunia yang utuh dan riil ini agama diterima sebagai unsur mutlak (Wilkes 1982: 14).

Pengertian negara pada abad pertengahan adalah suatu organisasi masyarakat yang bernama *civitas dei* (keagamaan). terciptanya negara karena adanya kewenangan yang diperoleh dari Tuhan, baik secara langsung maupun tidak. Dalam negara teokrasi segala kaidah kenegaraan

bersumber dari hukum dan peraturan agama, dan yang memegang kekuasaan adalah pemimpin agama.

Dogma-dogma kristiani pada abad pertengahan menjadi kaidah kenegaraan, sehingga yang memegang kekuasaan adalah gereja karena ia memiliki kewenangan politik. Karena itu, gereja memegang peranan penting sebagai religio-politik. Kedudukan gereja dipandang sebagai unsur yang harus ada dalam rangka pengaturan politik, dan sebagai dasar seluruh kerangka pemerintahan yang tak terpisahkan (Mac Iver, 155-156).

Renaissance

Sulit untuk menentukan secara pasti kapan abad pertengahan berakhir dan dimulainya abad modern. Keadaan abad pertengahan yang telah membelenggu kebebasan manusia masa itu mengakibatkan lahirnya suatu gerakan kebudayaan yang disebut *renaissance*. Renaissance sendiri berarti "kelahiran kembali" kebudayaan klasik Yunani, yaitu masa perubahan pandangan hidup dari abad pertengahan ke abad modern. Ia merupakan gerakan pembaharuan di bidang kerohanian, kemasyarakatan dan gereja.

Sebagai gerakan modern, renaissance membicarakan berbagai bidang seperti politik, kesusasteraan, seni dan filsafat. Pada saat itu bangsa Italia merupakan anak sulung Eropa. Jiwa Italia telah terbebas dari berbagai ikatan, sehingga bangsa ini maju pesat dan memperoleh banyak pelajaran

dari kebudayaan Yunani. Italia lalu menjadi bersifat individualistik, sehingga kepercayaan pada Tuhan berserta gereja merupakan hak individu yang bersangkutan. Kepercayaan pada Tuhan jadi runtuh dan agama hanya dipandang tak lebih dari sekedar pengalaman individu. dampak lebih jauh adalah terfokusnya perhatian hanya pada kehidupan keduniaan.

Renaissance telah menempatkan manusia sebagai pelaku utama, akibatnya semangat individualistik mendobrak dominasi gereja. Gerakan ini dipelopori oleh para humanis Itali. Masa itu terjadi perubahan nyata dalam kehidupan rohani yang mungkin dapat dirumuskan sebagai permulaan sekularisasi.

Renaissance telah melahirkan tokoh pemikiran tentang negara seperti Niccolo Machiavelli (1469-1527). Ia merupakan tokoh yang paling geram terhadap gereja pada permulaan abad limabelas. Hal ini disebabkan karena gereja tidak dapat mempersatukan Itali untuk menentang orang luar (Robert Down, 1965, 91). sikapnya menolak sama sekali ajaran kesusilaan dari pandangan hidup kristiani, karena dianggapnya dapat merugikan praktek kenegaraan. Karena itu, ia dianggap sebagai pembuka jalan bagi berkembangnya pemikiran sekular (Apter, 1987, 76).

Pencerahan

Pada abad 18 dimulai jaman baru yang berakar dari renaissance, yaitu jaman pencerahan (aufklarung

atau enlightenment) dengan semboyan "beranilah berpikir" (Sapire Aude!) (Hadiwijono, 1980, 47). Manusia barat kini telah bebas, merdeka dan tidak tergantung lagi pada kekuatan di luar dirinya. Hal ini merupakan tahap baru dalam proses emansipasi manusia Barat yang sudah dimulai sejak renaissance dan reformasi.

"Setelah abad ke 17 tumbuhlah suatu proses yang tak dapat ditahan yang dinamai "saecularisering". Segala perbuatan dan pikiran manusia makin lama makin bertalian dengan dunia. Dunia meminta perhatian dan tenaga manusia. Di dalam dunia ia mencari dan mendapatkan dunia. Tuhan dan agama, yang mula-mula mengisotonol seluruhnya lambat laun merupakan layarnya saja dan akhirnya layar itu pun disingkirkan. Sebagai ahli pikir pada abad ke-18 tak berTuhan, tetapi sebagian besar mempertahankan 'deisme'. Mereka memandang dunia sebagai satu sistem menurut sebab-sebab alam. Dunia ini dibentuk oleh Tuhan, tapi ia tak campur tangan lagi dalam perkembangan selanjutnya. Dapat dibandingkan dengan seorang pembuat jam...Kalau orang membiarkan saecularisering, dapat juga dinyatakan bahwa kenyataan ketuhanan lambat laun terdesak oleh kenyataan biasa, dan kalau kita ingat bahwa kaum borjuis merupakan golongan terkemuka dalam masyarakat tempat proses saecularisering itu, sama dengan pembentukan masyarakat borjuis" (Beerling 1980, 12-13).

Dengan semangat rasionalisme, orang sudah berpendapat bahwa tugas negara adalah mengurus kepentingan keduniaan semata. Dunia yang dikuasai oleh gereja pada masa lampau dirubah oleh golongan borjuis,

yaitu penganut cita-cita kebebasan rohani, politik dan agama. Sejalan dengan itu terjadi pula perubahan pada kerohanian masyarakat yang dapat dipandang sebagai reaksi terhadap agama dan gereja.

Menurut Ernst Troeltsch pencerahan merupakan permukaan dan permulaan dasar kebudayaan Eropa dan ia bukan semata-mata gerakan ilmu pengetahuan saja, melainkan suatu revolusi kebudayaan di segala lapisan kehidupan dalam perjuangannya melawan supranaturalisme gereja. Ia menentang sifat mendua antara budi dan wahyu. Tujuannya sendiri adalah memberi paham tentang dunia dalam kerangka rasional (Beerling 1989, 22).

Negara modern dengan asas kedaulatan rakyat merupakan suatu langkah penting ke arah kehidupan keduniawian yang bersifat rasionalistik-teknis. Negara sebagai kekuasaan telah kukuh dalam bentuknya, baik yang mutlak maupun yang demokratis bersama-sama budi negara yang timbul dari cita-cita kedaulatan rakyat, maka demokrasi tumbuh menjadi kekuasaan yang menentukan dalam dunia moderen.

Pada masa pencerahan muncul faham negara dan cita-cita negara. Negara yang berdaulat secara rasional dianggap sebagai kekuasaan yang tertinggi. Dari kedaulatan rakyat timbul faham tentang hak eksistensi negara. Hak eksistensi negara merupakan asas, bahwa dalam keputusan mengenai politik, kepentingan negara-

lah yang menentukan.

Zaman ini telah pula melahirkan tokoh-tokoh pemikir tentang negara seperti: John Locke (1632-1704), JJ Rousseau (1712-1778). Mereka merupakan pelopor bagi lahirnya pemikiran sekuler tentang negara. Dengan berpegang pada prinsip individualisme mereka melahirkan teori tentang negara berdasarkan kontrak sosial. Rousseau memandang negara sebagai suatu kehendak manusia dalam bentuk kontrak sosial. Negara adalah suatu yang berdiri atas kehendak khusus para anggotanya (Mac Iver, 1988: 395-400).

Bertolak belakang dari pemikiran mengenai negara sekular yang berangkat dari konsep individualisme terdahulu, maka Marx berpikiran lain. Agama bagi Marx merupakan *Phantasmagoria*, ia hanya ada dalam otak manusia belaka. Pada akhirnya Marx menyimpulkan bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat. Seluruh sejarah umat manusia tak lain dari perjuangan kelas antara borjuasi dan proletar. Proyeksi pemikiran Marx tentang negara didasarkan pada tesisnya tentang perjuangan kelas. Negara bagi Marx merupakan organ penguasa kelas, suatu organ penguasa kelas yang satu terhadap kelas lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban yang membenarkan secara hukum dan melangsungkan pemerasan ini dengan cara melunakkan pertentangan antara kelas-kelas itu (Lenin, 1981: 6-9).

Teori ini menginginkan peng-

hapusan negara dan bertujuan menciptakan suatu masyarakat tanpa kelas sebagai tahap akhir dari revolusi komunis.

Penutup

Sekularisasi norma-norma politik terjadi dalam tiga langkah bersejarah. Langkah pertama adalah nasionalisasi gereja. Langkah kedua, perluasan proses nasionalisasi tersebut kepada pemerintah. Langkah ketiga, tumbuhnya protestanisme dengan radikalisasi nilai-nilai instrumental. Protestanisme merupakan bentuk transisi pemerintah agama kepada bentuk pemerintahan sekular (Apter, 1987: 432-433).

Dalam bahasa politik, sekularisasi penting bagi dunia barat karena mengandung unsur-unsur konstitusional yang bertujuan untuk membentuk kerangka kerja bagi pemerintah yang tanggap akan perubahan. Sejalan dengan itu, maka terjadi pula desakralisasi politik, yaitu penghapusan legitimasi sakral kekuasaan politik yang merupakan prasyarat perubahan sosial-politik. Oleh karena itu sekularisasi sosial-politik mengakibatkan diterimanya ide tentang kedaulatan rakyat. Di saat itu terjadi fenomena hukum yang menggantikan agama sebagai norma-norma politik, sehingga masalah theologi menjadi persoalan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Apter, David, E, 1987, *Pengantar Analisa Politik*, terjemahan: Setiawan Abadi,

LP3ES, Jakarta.

Babcock, Philip, et all (Ed), 1961, *Webster's Third New International Dictionary of the English Language*, Meriam Company, Springfield, Masschusets.

Beerling, RF, TT, *Pertumbuhan Dunia Modern Jilid II*, Terjemahan Syaukat Djajadiningrat, Pustaka Rakyat, Jakarta. Djokosutono, 1982, *Ilmu Negara*, Ghalia, Jakarta.

Down, Robert, 1961, *Buku-buku Yang Merubah Dunia*, Terjemahan: Asrul Sani, PT Pembangunan, Jakarta.

Harun Hadiwijono, 1980, *Sari Sejarah Filsafat Barat II*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Iver, Mac, 1988, *Negara Modern*, terjemahan: Moertonono, Aksara Baru, Jakarta.

Lenin, VI, 1981, *State and Revolution*, International Publishers, New York.

Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Wilkes, Keith, 1982, *Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Sinar Harapan, Jakarta.

Ziya Gokalp, 1959, *Turkish Nationalism and Western Civilization*, George Allen and Unwin Ltd, London.